

DEMOKRASI PARTISIPATIF DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK: TANTANGAN DAN PELUANG DI INDONESIA

Sri Yulianty Mozin¹⁾, Vanda Imelda Patuti²⁾, Hadidjah Hasan³⁾, Zubaidah Mahmud⁴⁾,
Mohamad Prayuda Sampara⁵⁾

¹Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
yulmozin@ung.ac.id

²Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
Vandaimelda05@gmail.com

³Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
Hadijahasan171@gmail.com

⁴Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
Zubaidahmahmud2@gmail.com

⁵Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
yudhasampara@gmail.com

ABSTRAK

Proses pembuatan kebijakan di Indonesia semakin menekankan demokrasi partisipatif sebagai sarana untuk meningkatkan legitimasi, keterbukaan, dan akuntabilitas pilihan pemerintah. Rendahnya kapasitas masyarakat, kesenjangan pengetahuan, dan birokrasi yang berfokus pada pusat hanyalah beberapa dari sekian banyak tantangan demokrasi partisipatif yang masih ada. Lebih banyak warga negara dapat diikutsertakan dalam proses pembuatan kebijakan jika kita mengatasi tantangan utama demokrasi partisipatif dan menemukan cara untuk mengatasinya. Peningkatan teknologi digital, desentralisasi administrasi, dan pemahaman publik tentang hak-hak partisipatif merupakan peluang strategis untuk memperkuat demokrasi partisipatif di Indonesia. Hasil-hasil ini merupakan hasil dari pendekatan penelitian kualitatif yang mengandalkan survei literatur yang relevan dan pemeriksaan kebijakan-kebijakan yang relevan. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, penelitian ini menyarankan untuk membuat perubahan kebijakan yang lebih inklusif, membangun kapasitas masyarakat, dan memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya untuk keterlibatan publik yang lebih baik.

Kata Kunci: Demokrasi, Partisipatif, Kebijakan Publik

ABSTRACT

An increasing number of Indonesian public officials see participatory democracy as a way to make government decision-making more transparent, accountable, and plausible. But, many challenges remain in the way of fully implementing participatory democracy, including insufficient community capacity, knowledge disparity, and an overly bureaucratic system. In order to improve public participation in policymaking, this essay analyzes the main challenges of participatory democracy and proposes solutions. Using qualitative methodologies grounded in literature reviews and policy analyses, this study establishes that digital technology development, government decentralization, and public knowledge of participatory rights present strategic opportunities to promote participatory democracy in Indonesia. In order to address these challenges, this research proposes enhancing community capacity, enhancing the utilization of technology for public involvement, and introducing more inclusive policy reforms.

Keywords : *Democracy, Participatory, Public Policy*

Submisi: 02-05-2025

Diterima: 02-05-2025

Dipublikasikan: 05-05-2025

PENDAHULUAN

Demokrasi partisipatif mendorong keterlibatan warga negara dalam tata kelola publik sebagai sarana untuk menjamin bahwa wakil rakyat mendengarkan dan menanggapi kepentingan dan keinginan semua warga negara. Indonesia telah mengeksplorasi gagasan ini secara intensif sejak Reformasi 1998 sebagai bagian dari upayanya untuk mempromosikan demokrasi. Penelitian tambahan diperlukan untuk sepenuhnya memahami peluang dan risiko baru yang muncul bersama pembuatan kebijakan publik yang menggabungkan demokrasi partisipatif.

Meskipun secara normatif telah banyak regulasi yang mendorong partisipasi publik, seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada praktiknya partisipasi masyarakat sering kali bersifat simbolik dan belum menyentuh aspek substantif dari proses kebijakan. Partisipasi masyarakat masih terbatas pada konsultasi formal tanpa jaminan bahwa aspirasi tersebut benar-benar diakomodasi dalam keputusan akhir.

Era digital memberikan peluang baru bagi penguatan demokrasi partisipatif. Teknologi informasi membuka ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah dan warga, baik melalui platform e-government, media sosial, maupun forum-forum daring yang memungkinkan diskusi publik yang lebih inklusif. Namun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi digital, ketimpangan akses informasi, serta politik uang dan patronase masih menjadi hambatan serius bagi keterlibatan publik yang bermakna.

Dinamika tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana demokrasi partisipatif dijalankan dalam praktik pembuatan kebijakan publik di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi serta mengeksplorasi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran masyarakat dalam proses kebijakan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Samsiah Nelly (2024), bahwa secara keseluruhan, masyarakat Indonesia tidak begitu aktif dalam membentuk kebijakan dibandingkan dengan daerah lain. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya literasi dan pemahaman politik masyarakat umum. Hanya sedikit orang yang ikut serta karena mereka tidak menganggap pendapat mereka penting dalam hal penetapan kebijakan.

Selain itu, minimnya sosialisasi pendidikan politik menyebabkan kurangnya kesempatan yang sama untuk memperoleh pengetahuan. Masyarakat di daerah pedesaan terkadang tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah karena tantangan yang mereka hadapi dalam mengakses informasi tentang kebijakan. Fakta bahwa masyarakat tidak memiliki literasi politik untuk berpartisipasi secara bermakna dalam perdebatan kebijakan memperburuk masalah ini. Namun, pilihan digital tambahan dapat memotivasi lebih banyak orang untuk ikut serta. Forum daring memungkinkan pertukaran gagasan secara bebas dan partisipasi publik dalam perdebatan tentang masalah kebijakan publik. Orang-orang kini dapat terlibat dalam politik melalui media sosial.

Menurut Elizamiharti, dan Nelfira (2023), tetapi mereka perlu berhati-hati agar tidak menimbulkan perpecahan di antara berbagai faksi politik. Selain itu, maraknya korupsi dan politik identitas dalam sistem politik kita. Demokrasi partisipatif rentan terhadap korupsi karena bergantung pada keterbukaan dan akuntabilitas setiap orang. Meskipun digunakan sebagai taktik untuk memengaruhi pemilih, politik identitas berisiko menempatkan komunitas tertindas pada posisi defensif dan mengabaikan kepentingan mereka yang sah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, menurut pandangan Penulis tantangan yang dihadapi sistem Demokrasi saat ini dalam kebijakan publik yaitu pihak Pemerintah dan masyarakat sipil, di antara pihak-pihak lain, harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Untuk

meningkatkan partisipasi dalam pembuatan kebijakan, diperlukan lebih banyak pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan literasi politik, menyediakan akses yang sama terhadap informasi, dan mengajarkan orang untuk memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Jika kita ingin individu ikut serta dalam demokrasi, kita juga harus memastikan bahwa lembaga-lembaga demokrasi kuat dan antikorupsi.

METODE PENELITIAN

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana demokrasi partisipatif memengaruhi kebijakan publik Indonesia, penelitian ini melakukan telaah pustaka. Dengan mengambil pendekatan ini, kami berharap dapat mempelajari lebih lanjut tentang sejarah demokrasi partisipatif dan gagasan, penelitian, serta kebijakan yang telah memengaruhinya.

1. Pendekatan dan Sumber Data

Semua buku, makalah kebijakan, jurnal, dan artikel dari lembaga penelitian terkait dikonsultasikan untuk mendapatkan data. Hanya publikasi yang diterbitkan dalam tiga tahun terakhir (2022-2024) yang akan dipertimbangkan dalam evaluasi literatur untuk menjamin bahwa data tersebut terkini dan relevan.

2. Kriteria Pemilihan Literatur

Kriteria berikut digunakan untuk memilih sumber pustaka:

- Seberapa penting partisipasi demokrasi dan pembuatan kebijakan publik.
- Karya ini diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang terindeks di tingkat nasional dan internasional.
- Publikasi tepercaya yang diterbitkan oleh lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pemerintah.
- Sebuah studi yang secara empiris mengkaji manfaat dan kekurangan demokrasi partisipatif di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pencarian informasi ini dilakukan menggunakan berbagai sumber akademis, termasuk Google Scholar, ScienceDirect, Springer, basis data dari lembaga penelitian terkait, dan jurnal nasional seperti SINTA. Frasa pencarian yang digunakan adalah:

- "Demokrasi Partisipatif di Indonesia"
- "Partisipasi Publik dalam Pembuatan Kebijakan"
- "Kendala Demokrasi di Indonesia"
- "Peran E-Government dalam Membina Demokrasi Digital"

4. Teknik Analisis Data

Dengan menggabungkan hasil dari beberapa sumber ke dalam tema-tema menyeluruh, seperti:

- Faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan, metode sintesis tematik digunakan untuk menganalisis data.
- Ada hambatan budaya dan struktural terhadap demokrasi partisipatif.
- Kemungkinan teknologi digital untuk meningkatkan keterlibatan.

5. Validitas dan Keabsahan Data

Dengan mengevaluasi beberapa sumber yang menawarkan hasil serupa, kami memanfaatkan triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan data. Untuk memastikan kami memiliki semua fakta, kami memeriksa ulang data dari publikasi ilmiah dengan laporan resmi pemerintah dan kelompok independen.

Dengan memanfaatkan pendekatan tinjauan pustaka ini, penelitian ini bertujuan untuk

memberikan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada sains dan untuk menyelidiki secara mendalam pro dan kontra demokrasi partisipatif dalam pembuatan kebijakan publik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji pro dan kontra penggunaan demokrasi partisipatif dalam pengambilan keputusan publik di Indonesia. Pada bagian ini, kami akan membahas poin-poin terpenting dari tinjauan pustaka ini.

Ketimpangan dalam akses informasi dan rendahnya tingkat pendidikan politik merupakan tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam upayanya mencapai demokrasi partisipatif. Menurut sebuah studi tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), hanya sedikit orang Indonesia yang memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara bermakna dalam wacana politik. Beberapa politisi mampu memberikan dampak yang lebih besar pada pembuatan kebijakan daripada yang lain, dan kesenjangan ini menjelaskan alasannya.

Selain itu, ada banyak masalah yang disebabkan oleh politik identitas dan korupsi yang merajalela. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada tahun 2022 menemukan bahwa korupsi masih terjadi di beberapa tingkat pemerintahan. Artinya, akuntabilitas dan transparansi yang dibutuhkan untuk demokrasi yang bertanggung jawab terhambat. Penggunaan politik identitas sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan, membungkam wacana yang masuk akal, dan mendelegitimasi sudut pandang minoritas juga cukup tidak lazim.

Meskipun demokrasi partisipatif menekankan keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, partisipasi masih rendah di Indonesia. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Universitas Indonesia menemukan bahwa sejumlah besar individu merasa suara mereka tidak didengar dalam hal pembuatan kebijakan. Hal ini, pada gilirannya, melemahkan demokrasi deliberatif dan nilai dari berbagai perspektif.

Lebih banyak orang dapat berpartisipasi dalam politik berkat menjamurnya perangkat digital, khususnya web dan media sosial. Menurut Elizamiharti dan Nelfira (2023), platform media sosial dapat menyediakan platform tempat orang merasa nyaman mendiskusikan politik dan mengekspresikan pendapat mereka. Membuat pemerintah lebih terbuka dan bertanggung jawab adalah keuntungan lain dari keterlibatan digital. Sisi sebaliknya adalah bahwa hal ini berfungsi sebagai peringatan keras bahwa munculnya "gelembung filter" dan perpecahan pendapat yang diakibatkannya dapat dicegah dengan literasi digital yang memadai.

Kita membutuhkan lebih banyak warga negara untuk menggunakan hak-hak demokrasi mereka untuk memengaruhi kebijakan publik, tetapi melakukannya tidak akan mudah. Demokrasi menghadirkan tantangan bagi sistem hukum Indonesia karena karakternya yang selalu berubah, tetapi juga menghadirkan peluang, menurut penelitian oleh Hanisa dan Firdaus (2023), untuk meningkatkan lembaga peradilan dan keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan. Budaya politik Indonesia memiliki masalah dengan korupsi, politik identitas, dan ketimpangan informasi, sehingga sulit untuk menerapkan demokrasi partisipatif dalam tata kelola publik. Namun, ada cara untuk meningkatkan partisipasi dalam demokrasi, seperti melibatkan lebih banyak orang dan memanfaatkan teknologi secara lebih efisien. Untuk mengatasi masalah ini dan memanfaatkan peluang yang mungkin muncul, pemerintah, masyarakat sipil, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya harus bekerja sama. Korupsi harus diperangi, literasi politik dan digital harus ditingkatkan, dan lembaga-lembaga demokrasi harus diperkuat jika Indonesia ingin membangun demokrasi partisipatif yang lebih baik dan lebih inklusif.

Hasil pengamatan terhadap beberapa proses pembuatan kebijakan publik di tingkat nasional

dan daerah menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat cenderung bersifat formalistik. Keterlibatan warga biasanya terbatas pada forum musyawarah seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), namun keputusan akhir tetap didominasi oleh elit birokrasi dan politik. Selain itu, tidak semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas atau akses untuk terlibat, terutama kelompok marginal seperti masyarakat adat, perempuan di pedesaan, dan difabel.

Hasil tersebut di atas, menunjukkan bahwa demokrasi partisipatif belum sepenuhnya substantif. Masih terdapat kesenjangan antara prinsip partisipasi dan implementasinya di lapangan. Partisipasi yang sejati menuntut adanya ruang deliberatif yang adil, di mana suara masyarakat benar-benar didengar dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

Berbagai tantangan yang ada saat ini, tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek budaya politik. Masyarakat cenderung pasif dan melihat kebijakan sebagai urusan pemerintah, bukan tanggung jawab kolektif. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas dan perubahan budaya politik menjadi kunci dalam memperkuat demokrasi partisipatif.

Peluang dari perkembangan teknologi digitalisasi telah membuka peluang signifikan bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Pemerintah mulai mengembangkan platform digital seperti e-Musrenbang, LAPOR!, dan forum diskusi daring. Media sosial juga menjadi sarana efektif untuk menyuarakan opini dan mengawasi jalannya kebijakan. Maka, pemanfaatan teknologi harus disertai dengan pendekatan inklusif agar tidak memperlebar kesenjangan digital. Pemerintah perlu memastikan bahwa platform digital partisipatif mudah diakses, ramah pengguna, serta memperhatikan keberagaman latar belakang sosial masyarakat.

Beberapa studi kasus, seperti penyusunan Perda berbasis masyarakat di beberapa kota, menunjukkan bahwa model kolaboratif antara pemerintah, LSM, dan komunitas lokal mampu menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif. Model ini menekankan dialog yang setara dan pengambilan keputusan bersama. Pendekatan kolaboratif ini membuktikan bahwa partisipasi yang bermakna dapat dilakukan jika ada kemauan politik dari pemerintah serta dukungan kapasitas dari masyarakat sipil. Model ini layak dijadikan contoh dalam upaya penguatan demokrasi partisipatif ke depan.

KESIMPULAN

Menurut penelitian, masih terdapat sejumlah tantangan besar dalam penerapan demokrasi partisipatif dalam pembuatan kebijakan publik di Indonesia. Isu-isu seperti kesenjangan informasi, rendahnya literasi politik, dominasi dan korupsi politik identitas, dan tidak adanya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan merupakan masalah utama. Penyempitan partisipasi dan ketidakmampuan proses demokrasi untuk mewakili kepentingan publik merupakan akibat dari isu-isu ini. Tentu saja, ada kendala, tetapi ada juga kemungkinan untuk meningkatkan fungsi demokrasi partisipatif di Indonesia. Mengintegrasikan perangkat digital ke dalam keterlibatan warga negara merupakan salah satu cara yang paling menjanjikan karena menawarkan lebih banyak saluran untuk interaksi publik dan membuat saluran yang sudah ada menjadi lebih efektif. Masyarakat dapat belajar lebih banyak tentang pentingnya terlibat dalam pembuatan kebijakan melalui pendidikan politik dan dengan berupaya memperkuat lembaga-lembaga demokrasi. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan demokrasi partisipatif, perlu ada upaya kolaboratif antara sektor publik, akademisi, masyarakat sipil, dan industri.

Demokrasi partisipatif di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi struktural, kultural, maupun teknologis. Namun, di tengah berbagai keterbatasan tersebut, terdapat peluang besar untuk memperkuat peran masyarakat dalam proses kebijakan, terutama melalui inovasi digital dan model kolaboratif. Perlu adanya komitmen politik, peningkatan literasi publik, serta sistem

yang menjamin akuntabilitas dan inklusivitas dalam setiap tahapan perumusan kebijakan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan warga negara dalam pembuatan kebijakan publik di Indonesia, yaitu:

1. Meningkatkan Kompetensi Warga Negara dalam Aspek Teknologi dan Politik

Negara dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan program pendidikan politik mereka sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban demokratis mereka. Meningkatkan program literasi digital sangat penting dalam memerangi disinformasi dan perpecahan sosial.

2. Membangun Kerangka Digital yang Melibatkan Setiap Pengguna

Jika kita ingin lebih banyak orang menggunakan perangkat digital untuk memengaruhi kebijakan, kita memerlukan platform formal tempat mereka dapat menyuarakan keinginan mereka. Mereka yang tinggal di daerah pedesaan, khususnya, harus dijamin akses yang sama oleh pemerintah.

3. Membuat Pemerintah Lebih Transparan dan Akuntabel

Untuk mengurangi contoh politik identitas dan tindakan tidak etis, mekanisme akuntabilitas dan transparansi perlu ditingkatkan secara menyeluruh dalam proses pembuatan kebijakan. Memastikan pengungkapan informasi publik yang efektif adalah salah satu pendekatan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Langkah keempat: Libatkan Masyarakat dalam Pembuatan Undang-Undang

4. Jika warga ingin ikut bersuara dalam pembuatan kebijakan pemerintah, sidang, rapat, dan konsultasi pemerintah harus lebih terbuka terhadap semua sudut pandang. Untuk tujuan ini, akan sangat membantu jika menyediakan platform tempat orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat dapat berkumpul secara daring.

DAFTAR PUSTAKA

Elizamiharti, E., & Nelfira, N. 2023. Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, Volume 2, Nomor 01, hal. 61-72.

Hanisa, I., & Firdaus, S. U. 2023. Dinamika Demokrasi dalam Kebijakan Publik: Tantangan dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia. *Sovereignty*, Volume 2, Nomor 4, hal. 340-353.

Nelly, S. 2024. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Sociopolitico*, Volume 6, Nomor 1, hal. 86-94.
<https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v6i1.119>

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2024. Tantangan Demokrasi Deliberatif di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

